



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN JASA PERHOTELAN DI KOTA PADANG TERHADAP PERENCANAAN DAN PENGELAPAN PAJAK

SKRIPSI



WILLI AURORA PANE
05 153 071

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Akuntansi, Pembimbing Skripsi dan Tim Dosen Penelaah skripsi menyatakan bahwa skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama : WILLI AURORA PANE
Nomor Buku Pokok : 05 153 071
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Perusahaan
Jasa Perhotelan di Kota Padang Terhadap
Perencanaan dan Penggelapan Pajak**

Telah diseminarkan tanggal 26 Oktober 2011 dan telah disetujui sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Pembimbing Skripsi

Drs. Rinaldi Munaf. MM, Ak.CPA
NIP. 196205041988111001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr.H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 19600911 1986031001

Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP. 19541009 1980121001

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wajib Pajak perusahaan jasa perhotelan di Kota Padang terhadap perencanaan dan penggelapan pajak. Wajib Pajak dalam melakukan manajemen pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan agar tidak keluar dari peraturan perpajakan yang telah ditentukan selain itu dengan memiliki pemahaman yang memadai mengenai perencanaan dan penggelapan pajak, wajib pajak dapat melakukan strategi perencanaan pajak tanpa melanggar undang-undang.

Dalam penelitian ini terdapat tiga hal yang dapat diketahui, pertama pengetahuan wajib pajak tentang pengetahuan umum perpajakan, kedua pemahaman terhadap konsep dasar perencanaan pajak, ketiga pemahaman terhadap penggelapan pajak dan yang keempat pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengetahuan umum perpajakan wajib pajak adalah 71.20%, tingkat pemahaman terhadap perencanaan pajak adalah 74.49%, tingkat pemahaman terhadap penggelapan pajak adalah 81.16%, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap strategi perencanaan pajak adalah 60.24%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa wajib pajak perusahaan jasa perhotelan di Kota Padang paham terhadap perencanaan dan penggelapan pajak.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penggelapan Pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Perusahaan Jasa Perhotelan di Kota Padang Terhadap Perencanaan dan Penggelapan Pajak”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak lepas dari do’a, dukungan dan bimbingan baik materil maupun moril dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda Noviati dan Ayahanda Harris Pane tercinta, yang selalu mendukung penulis dari segi moril dan materil serta selalu menanyakan hal yang sama dalam dua tahun belakangan ini.
2. Adik-adik tercinta Vitri Harita Pane, Tessa Harinovita Pane, Dini Widia Pane, Torren Gail Pane, dan si kecil Melodi Tiara Pane, jadilah pribadi yang bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Bapak Drs. Rinaldi Munaf MM, Ak, CPA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan petunjuknya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Yuskar, SE, MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing akademik, penguji kompre, sekaligus tempat bertukar pikiran yang asyik.
6. Terima kasih kepada Bapak Aries Tano yang membuka cakrawala perpajakan penulis, Bapak Suhandi, Ibu Rahmi, Ibu Sri Dewi Edmawati, Ibu Warnida dan seluruh Dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga bagi penulis.

7. Pihak Biro Jurusan Akuntansi, Mama Loly, Da Ari, Ni Efa, Da Koko, Ni Pit yang telah memberikan banyak bantuan dalam kelancaran urusan administrasi akademis penulis.
8. Teman-teman angkatan 2005 Jurusan Akuntansi:
 - Billy, nanda, aal 106, jek J-lo, pakoik, udin, ucup, caut, asdi, helm, deo, bontet, angga, anton, panji, yudha kangen serta teman-teman lain yang selalu ada untuk penulis dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini.
 - Silvi 'iled', nia'neo', aie, lulu, nisa, yang merupakan toa angkatan. Tisky 'bandit', mutia, riri sahyda, lizanah, ummy, serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
9. Kanda kanda tercinta angkatan 2004 keatas, kanda Bobby Ilyas atas semua ilmu kehidupannya, kanda tubagus taufik , da riko, bg dika, bg risky gambuang, bg heru, da rijak, da wil, da osravit, bg aldo dan kanda-kanda lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Adinda-adinda, Khairina, angin dan rekan-rekan. Dika, inma, taf, ni el, biceng, reynaldi dan rekan-rekan. Doli, okta, PW, taufik, puput, melin dan rekan-rekan. Surip, ajo, rizki, jeka, uty, susan, nia dan rekan-rekan serta adinda 2010 dan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Partai saparampek imam bonjol, yang memberikan keringat sore pada penulis. Meski hujan, badai, panas kita selalu menggoyang imam bonjol (bilo kito main lai ko).
12. Semua Elemen yang pernah berpartisipasi dalam AOC kakanda, adinda dan advance semuanya (ini proses bukan hasil).
13. Kepada uda-uda dan uni-uni staff ARR, bg hilman, kak lili, kak lolo, kak riri, bg ari eld, indah, mas Vincent. Staff ARR lainnya fia, mira, dandhy, rudolfo, Irene.
14. Terima kasih kepada Google, Wiki, serta folder "Alhamdulillah folder ini ada di sini" serta ctrl+c dan ctrl+v yang amat sangat membantu.
15. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak disadari oleh penulis dan dengan segala kerendahan hati

penulis mempersembahkan karya ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Padang, Februari 2012



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Review Penelitian Terdahulu	8
2.2 Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak	9
2.2.1 Definisi Pajak	9
2.2.2 Hukum Pajak	13
2.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	16
2.3.1 Pengertian-Pengertian Dalam KUP.....	16
2.3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak	19
2.3.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak	23
2.3.4 Tarif Pajak.....	25
2.4 Konsep Dasar Manajemen Pajak	27
2.4.1 Pengertian Manajemen Pajak.....	27
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Manajemen Pajak	28
2.5 Perencanaan Pajak.....	28
2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak.....	28
2.5.2 Manfaat Perencanaan Pajak	31
2.5.3 Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak.	32
	v

2.5.4 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak	35
2.5.5 Syarat-Syarat Melakukan Suatu Perencanaan Pajak.....	36
2.5.6 Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pajak	37
2.6 Pelaksanaan Peraturan Perpajakan.....	38
2.7 Pengendalian Pajak	40
2.8 Saat Pelaksanaan Manajemen Pajak	40
2.9 Tahap-Tahap Perencanaan Pajak	41
2.10 Strategi Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan	43
2.11 Perencanaan dan Penggelapan Pajak Untuk PPh Badan.....	49
2.11.1 Pengertian PPh Badan dan Penggelapan PPh Badan	49
2.11.2 Tindakan Yang Dianggap Sebagai Penggelapan Pajak	50
2.11.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Melakukan Penghematan Pajak Secara Ilegal.....	51
2.12 Perusahaan Perhotelan	52
2.12.1 Pengertian Hotel dan Jenis-Jenis Hotel.....	52
2.12.2 Segmentasi Industri Perhotelan.....	53
2.12.3 Perkembangan Perhotelan Kota Padang	54

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	56
3.2 Populasi dan Sampel	56
3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel.....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5 Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV : ANALISIS HASIL

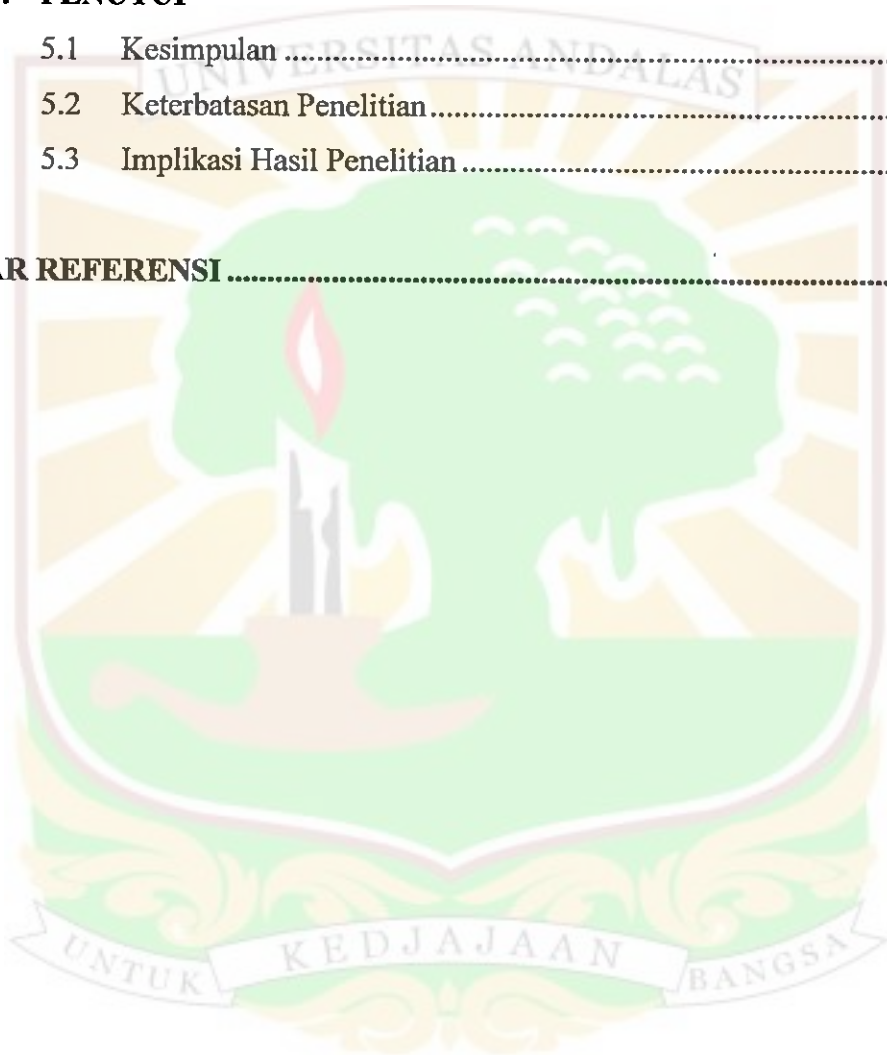
4.1 Karakteristik Responden.....	60
----------------------------------	----

4.2	Hasil Penelitian	62
4.2.1	Pemahaman Terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan	62
4.2.2	Pemahaman Terhadap Perencanaan Pajak	64
4.2.3	Pemahaman Terhadap Penggelapan Pajak	65
4.2.4	Pemahaman Terhadap Strategi Perencanaan Pajak	66

BAB V : PENUTUP

5.1	Kesimpulan	69
5.2	Keterbatasan Penelitian	70
5.3	Implikasi Hasil Penelitian	70

DAFTAR REFERENSI	viii
-------------------------------	-------------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi dilema dalam praktek perpajakan di suatu negara adalah terdapatnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Di satu sisi wajib pajak berusaha meminimalisasi kewajiban pajaknya sedangkan pemerintah akan berusaha agar pemasukan dari sektor pajak menjadi maksimal. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Waluyo (2010:2), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Ditinjau dari aspek ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dalam hal pelaksanaan beban perpajakan ini, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah (Suandy:2006:1). Bagi Wajib Pajak, dalam hal ini perusahaan sebagai Wajib Pajak badan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi

sebagai berikut:

1. Sebagai kajian awal bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan perencanaan pajak dengan mengetahui rata-rata tingkat pemahaman karyawan terhadap perencanaan pajak dan perundang-undangnya melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat diidentifikasi langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh perusahaan sehubungan dengan peningkatan pemahaman karyawan.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan yang sudah menerapkan tax planning apakah strategi tax planning yang mereka lakukan saat ini telah sesuai dengan kaidah dan peraturan Undang-Undang perpajakan.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan perencanaan dan penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Merupakan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

3. Bab III Metode Penelitian

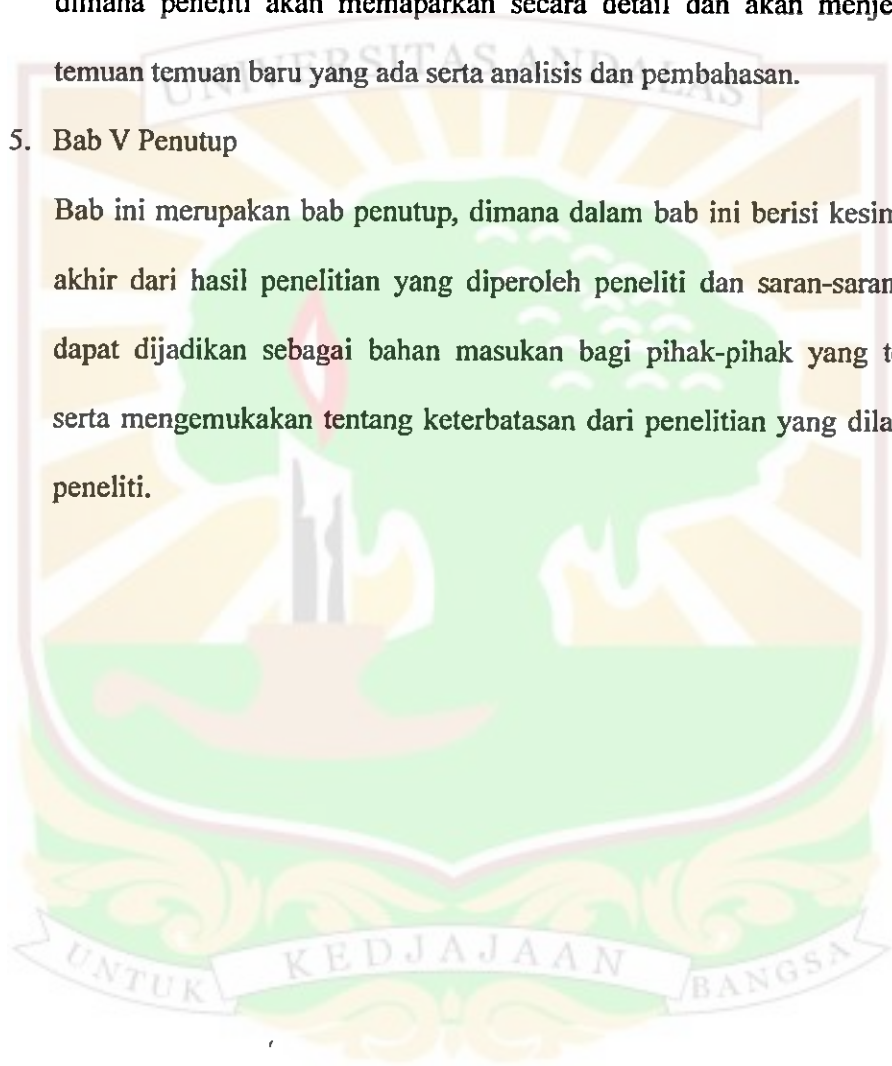
Membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. Bab IV Analisis Hasil

Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian, dimana peneliti akan memaparkan secara detail dan akan menjelaskan temuan-temuan baru yang ada serta analisis dan pembahasan.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup, dimana dalam bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan dari penelitian yang dilakukan peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perencanaan dan penggelapan pajak pernah dilakukan oleh Yulia Sari pada tahun 2007 dengan judul Analisa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus Terhadap Perencanaan Pajak dan Penggelapan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sari ini bertujuan untuk menguji seberapa baik tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus terhadap perencanaan dan penggelapan pajak serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus mengenai perencanaan dan penggelapan pajak tersebut. Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak badan perusahaan berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang berlokasi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru dan fiskus yang bekerja di KPP Pekanbaru. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa wajib pajak badan PT dan fiskus pada wilayah KPP Pekanbaru dianggap paham terhadap perencanaan dan penggelapan pajak, tetapi terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara wajib pajak badan dengan fiskus mengenai perencanaan dan penggelapan pajak tersebut.

Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Yulia Sari. Keterbatasan penelitian yang diungkapkan oleh Yulia Sari, salah satunya adalah peneliti tidak membedakan sampel atas skala ukuran dan jenis perusahaan dengan alasan tidak tersedianya data tersebut di kantor pajak dan dikarenakan keterbatasan waktu, sehingga dikhawatirkan hasil penelitian dapat mengandung bias.

Zain (2008:3) mengungkapkan beberapa faktor yang berperan dalam rangka implikasi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi administrator perpajakan, diantaranya sebagai berikut:

- (a) Wajib pajak memahami dengan jelas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di satu pihak, dan di lain pihak ada usaha-usaha administrator pajak yang memungkinkan para wajib pajak mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- (b) Wajib pajak hendaknya ikut dilibatkan dalam proses pengembangan dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (c) Salah satu hambatan utama untuk tercapainya administrasi perpajakan yang efisien ialah keanekaragaman ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak efektif lagi dan masih ada pada setiap pemerintahan.
- (d) Kebijakan yang bersifat kompromi lainnya yang dilakukan oleh beberapa pemerintah ialah pembebanan bermacam-macam tarif dalam struktur perpajakan yang ditujukan untuk mengimbangi kemungkinan adanya kecurangan.
- (e) Sumber lainnya yang menyebabkan tidak efisiennya administrasi perpajakan, apabila pemerintah mengembangkan sistem perpajakan, dimana yuridiksi dari berbagai jenis pajak diserahkan pengelolaannya pada berbagai instansi dan bahkan kadang-kadang berbagi fungsi seperti pemungutan pajak, verifikasi atau pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pekejaan administrasi lainnya diserahkan pula pada berbagi instansi.
- (f) Dalam hal apapun juga, berbagi ketentuan perundang-undangan perpajakan

mudah dimengerti dan dapat mencapai sasaran tanpa melupakan adanya jaminan penegakan hukum.

2. Hukum pajak formal

Hukum pajak formal mengatur tentang tatacara mengimplementasikan hukum material menjadi suatu kenyataan. Termasuk didalamnya cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik sebelum maupun sesudah diterimanya surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Sedangkan tujuan pengaturan hukum pajak formal ini adalah untuk melindungi fiskus dan wajib pajak dan memberikan jaminan hukum material dapat diselenggarakan dengan tepat (Waluyo:2010:11).

Indonesia memberikan landasan konstitusional sistem perpajakan dalam UUD 1945 pasal 23A. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Artinya adalah konstitusi memberikan landasan hukum tentang pengenaan pajak yang kemudian didelegasikan pengaturan yang lebih rincinya kepada undang-undang. Undang-undang adalah produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif yang dapat bersumber dari usulan pemerintah (eksekutif) berupa rancangan undang-undang.

Meskipun konstitusi (UUD 1945) seperti umumnya konstitusi dibanyak negara telah mendelegasikan hukum pajak kepada undang-undang perpajakan, namun prakteknya di Indonesia pendelegasian berlanjut kepada produk-produk peraturan yang lebih rendah dari undang-undang seperti peraturan pemerintah (PP) dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Hubungan hukum

pajak dengan hukum lain yaitu:

1) Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Prof. Mr. Paul Scholten seorang guru besar pada universitas Amsterdam berpendapat bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang daripadanya, sedangkan menurut Prof. W. F. Prins (guru besar UI dalam ilmu hukum pajak) berpendapat hubungan erat ini mungkin sekali timbul karena banyak digunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak. Walaupun secara prinsip harus dipahami dengan teguh adalah bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidaklah selalu dianut oleh hukum pajak. Pengaruh hukum perdata dalam hukum pajak dapat disebut sebagai berikut :

- Pengertian suatu istilah dalam hukum pajak diartikan sama dengan hukum perdata.
- Kalau tidak ada penjelasan dalam hukum pajak, maka pengertian dalam hukum perdata diterapkan

Hubungan erat hukum pajak dengan hukum perdata dapat pula disebabkan oleh kenyataan bahwa bilamana diperlukan suatu kupasan mengenai persoalan yang tidak dijelaskan dalam undang-undangnya, dalam hal demikian seringkali harus dipertimbangkan masak-masak interpretasi mana yang harus dipergunakan, yang yurikdis ataukah yang menurut kenyataan.

Sebaliknya pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata cukup besar. Akibat adanya ketentuan bahwa *lex specialis* (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari *lex generalis* (peraturan yang umum), maka

dalam setiap undang-undang pajak haruslah penafsirannya pertama-tama dianut peraturan yang istimewa ini (Wirawan dan Burton:2008:14)

2). Hubungan dengan Hukum Pidana

Bahwa dalam hukum pajak juga terdapat sanksi-sanksi pidana. Dalam perkembangannya, hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonasi semenjak 16 Mei 1927, dan kesempatan ini banyak dipergunakan karena adanya kenyataan bahwa peraturan-peraturan administratif/hukum tata usaha sangat memerlukan sanksi-sanksinya yang menjamin ditaati oleh khalayak ramai. Dalam peraturan pajak juga terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus, misalnya tentang dapatnya badan hukum dikenakan suatu hukuman walaupun KUHP telah banyak memuat ancaman bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pajak ini (Wirawan dan Burton:2008:15)

2.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

2.3.1 Pengertian-Pengertian Dalam KUP

Dengan mengacu pada Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian-pengertian tersebut antara lain:

1. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Wajib pajak datang sendiri ke Kantor Direktorat Jendral Pajak di wilayah tempat tinggal wajib pajak sekaligus melampirkan kelengkapannya dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak setempat, termasuk wanita kawin yang melakukan pisah harta.

Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang meliputi:

1. Badan
2. Setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan netto diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Menurut Suandy (2008:158), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- SPT-Masa

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak

atau suatu saat.

- SPT-Tahunan

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Formulir SPT Masa harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan biasanya dikirim oleh kantor pajak ke alamat wajib pajak. Untuk wajib pajak yang menggunakan pembukuan, penyampaian SPT harus disertai dengan laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan harus melampirkan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
4. Untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN, paling lambat akhir bulan.

Menurut Suandy (2008:147), Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah:

1. Sebagai sarana atau media yang digunakan untuk membayar pajak.
2. Sebagai bukti pembayaran pajak.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di:

1. Kantor Pos
2. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
3. Bank BUMN dan Bank BUMD

Batas waktu pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi pembayaran masa, pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan dan pembayaran pajak karena terbitnya surat ketetapan atau surat keputusan.

Pembayaran masa adalah pembayaran yang dilakukan pada setiap masa pajak. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 2.1 Batas Waktu Pembayaran Masa Untuk Setiap Jenis Pajak

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran
1.	PPh Pasal 21	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2.	PPh Pasal 23	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
3.	PPh Pasal 25	Harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Merupakan subjek pajak pengganti yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarisnyalah yang merupakan subjek pajak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- Orang pribadi yang merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjalankan usaha di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT dan dapat menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Adapun yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak:

- a) Badan perwakilan negara asing
- b) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
- d) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang menjadi objek PPh dapat dikelompokkan menjadi

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri:

Tabel 2.1 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d 50.000.000	5%
> 50.000.000 s/d 250.000.000	15 %
> 250.000.000 s/d 500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Tarif tertinggi tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah. Perubahan tarif akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 Januari dan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tarif baru berlaku efektif. Hal tersebut dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010.

2.4 Konsep Dasar Manajemen Pajak

2.4.1 Pengertian Manajemen Pajak

Bila kita memandang dari sisi perusahaan jika pengelolaan pajak tidak dikelola dengan baik, perusahaan mungkin membayar pajak melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan sehingga keuangan perusahaan akan terganggu, atau sebaliknya jumlah yang dibayarkan kurang dari yang semestinya sehingga perusahaan terjerumus kedalam tindakan ilegal, akibatnya di satu sisi negara dirugikan dan di sisi lain dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, perusahaan akan dikenakan sanksi pidana dan denda administratif menurut jenis pelanggarannya yang tentunya akan memberatkan *cash flow* perusahaan.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak dapat diartikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy:2006:6).

Menurut Lembaga Manajemen Formasi, manajemen pajak dapat diartikan sebagai upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Manajemen Pajak

Dari pengertian manajemen pajak yang telah dijabarkan diatas, bahwa secara umum tujuan dari manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan merupakan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy:2006:7)

Menurut Lumbantoruan di dalam Suandy (2006:7) menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen

pajak, yang terdiri dari:

- Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
- Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*)
- Pengendalian pajak (*Tax Control*)

2.5 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy:2006:7). Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk tindakan (penggelapan pajak) yang sengaja melaporkan penghasilan kena pajak lebih kecil dari yang seharusnya sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil. Yang terpenting dari perencanaan pajak ini adalah tetap pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pajak merupakan rencana kebijakan keuangan perusahaan dengan memperhatikan kewajiban pembayaran pajak, peraturan pembayaran pajak dan kapasitas badan usaha serta faktor eksternal.

Beberapa orang ahli seperti yang dikutip dari Suandy (2006:7) memberikan pengertian perencanaan pajak sebagai berikut:

f) Lyons (1996)

Tax planning is arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability

g) Crumbley, at. Al (1994)

Tax planning is systematic analysis of differing tax potions aimed at the minimazion of tax liability in current and future tax periods

Menurut Suandy (2006:7), untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawfull*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*). Istilah yang sering digunakan yaitu *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memperkecil beban pajak atau melakukan rekayasa affair yang masih tetap berada dalam ketentuan perpajakan. *Organisation for economic and development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance* yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu sebetulnya yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini yang pada umumnya pra konsulen menunjukkan alat atau caranya avoidance dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak atau tidak. Kalau fenomena atau transaksi tersebut kena pajak, apakah dapat dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, setiap wajib pajak sebaiknya membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable event*) secara seksama dan baik. Perencanaan pajak merupakan proses dengan memperhatikan aspek perpajakan, tanpa mengesampingkan pertimbangan aspek non pajak yang signifikan, dengan maksud menentukan apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa melakukan transaksi, kegiatan dan hubungan dengan tujuan mengoptimalkan beban pajak atas objek pajak dan subjek pajak dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan perusahaan.

Dari pengertian tersebut diatas Gunadi menyatakan, jelas bahwa perencanaan pajak merupakan starting point dalam manajemen pajak (Suandy:2006:8). Kesalahan dalam pengambilan alternatif tindakan perencanaan pajak dapat berakibat fatal. Karena akibat yang ditanggung perusahaan bisa berakumulasi. Seperti pemberlakuan sanksi denda administratif yang besarnya bisa sampai empat kali pajak terutang dan juga akan terkait dengan perkara pidana, yang akhirnya adalah akan memberatkan cashflow perusahaan juga.

Pada prinsipnya perencanaan pajak merupakan bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Untuk itu perencanaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi untuk melakukan perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman yang baik akan aspek-aspek perencanaan pajak itu sampai dengan penutupan usaha (likuidasi) jika ada. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa perencanaan pajak itu merupakan suatu proses. Proses merupakan upaya intelektual, oleh karenanya untuk dapat membuat perencanaan pajak yang aktif diperlukan kemampuan dan kapabilitas intelektual yang cukup (Suandy:2006:8).

2.5.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada empat manfaat utama jika pihak manajemen menerapkan perencanaan pajak:

1. Penghematan kas keluar, pajak bisa dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus diperhitungkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba. Dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu cash flow perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cermat perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal ataupun terlambat sehingga dikenai sanksi atau denda. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara ontime, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang akan dibayarkan bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data terbaru untuk mengikuti perkembangan mengenai peraturan perpajakan terbaru. Tindakan ini berguna untuk menanggapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan mengetahui hak dan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak badan.

2.5.3 Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Menurut Suandy (2006:125), strategi mengefisiensikan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah yang seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisiensikan beban pajak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum bentuk perseorangan, firma dan kongsi adalah bentuk yang paling menguntungkan dibandingkan perseroan terbatas. Pada perseroan terbatas yang pemegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan terbatas dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang kurang dari 25%.
- b) Memilih lokasi dari perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan secara insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya.
- c) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari

berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.

- d) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha. Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate tidak dikenakan pajak.
- e) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center ada yang berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diambil manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan bagi beberapa wajib pajak dalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak yakni menghindari tarif yang paling tinggi. Tentunya proses ini dapat berjalan apabila tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan yang dikenakan pajak sudah melewati lapisan terendah.
- f) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang menerimanya.
- g) Pemilihan metode penilaian persediaan, ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan yaitu metode rata-rata dan FIFO. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami

inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok menjadi lebih besar daripada FIFO.

- h) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi disamping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembiayaan leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibanding melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
- i) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan dari awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian. Maka pilihannya menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan bisa ditunda untuk tahun berikutnya.
- j) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengerahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- k) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- l) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus

untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan.

m) Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh direktoral jendral pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:

- SPT lebih bayar
- SPT rugi
- tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
- terdapat informasi pelanggaran
- memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dirjen pajak

n.) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan pajak yang berlaku.

2.5.4 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Suandy (2006:27) membagi perencanaan pajak menjadi dua, berdasarkan undang-undang domestik, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (national tax planning)

Yaitu perencanaan pajak berdasarkan undang-undang domestik, baik prosedur maupun sanksi. Sebelum melakukan suatu perencanaan pajak domestik diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta praktik administrasi perpajakan.

2. Perencanaan pajak internasional

Yaitu dalam suatu transaksi tidak hanya berdasarkan undang-undang

domestik, tetapi juga berdasarkan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang perpajakan negara yang terlibat. Secara garis besar, masalah yang termasuk dalam ruang lingkup perpajakan internasional adalah:

- pengenaan pajak dari penghasilan yang sama oleh dua negara atau lebih
- pencegahan seminimal mungkin terjadinya pajak berganda
- kerjasama mengatasi penghindaran pajak dan penyelundupan pajak internasional

2.5.5 Syarat-Syarat Melakukan Suatu Perencanaan Pajak

Suandy (2006:10) mengemukakan tiga hal yang menjadi syarat-syarat jika hendak melakukan perencanaan pajak, yaitu:

1. tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pajak secara menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

2.5.6 Aspek-Aspek dalam Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2006:8) dalam perencanaan pajak perlu diperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi dalam proses perencanaan pajak:

1. Aspek formal dan administratif

Aspek formal dan administratif ini perlu dipahami oleh Wajib Pajak agar tidak terkena sanksi administratif dan pidana karena hal tersebut merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieleminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Aspek formal dalam perencanaan pajak mencakup pemenuhan Undang-Undang Perpajakan secara benar, dimana pungutan melalui Dirjen Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang tersebut memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak terjadi salah interpretasi antara Wajib Pajak dengan fiskus seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak.

Sedangkan aspek administratif mencakup kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban pajak berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

2. Aspek Material Perencanaan Pajak

Basis perhitungan pajak adalah objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen sebaiknya membuat perencanaan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang, untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap serta bebas dari rekayasa negatif.

2.6 Pelaksanaan Peraturan Perpajakan

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, maka pada fungsi ini pelaksanaan kewajiban pajak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu perusahaan harus terus mengikuti perkembangan dan isu-isu perpajakan yang terbaru. Selain itu untuk mencapai tujuan manajemen pajak, perlu diselenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Zain (2008:4) dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara optimal, ada beberapa unsur penting yang harus diketahui dan dipahami oleh wajib pajak, yaitu:

- *Tax Compliance*

Merupakan kegiatan-kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, meliputi; administrasi yang harus dilakukan, pembukuan, pemotongan atau pemungutan

pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya.

- *Tax Planning*

Merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

- *Tax Litigation*

Merupakan usaha-usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Tax litigation ini biasanya berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan dan cara-cara lain yang sesuai dengan undang-undang.

- *Tax Research*

Merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan.

2.7 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Lombantoruan (1996) dalam Suandy (2006:11) menjelaskan bahwa pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Selain itu pengendalian pajak juga

termasuk ke dalamnya pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar daripada pajak terutang. Apabila diperkirakan bahwa jumlah pajak yang disetor telah melampaui pajak yang terutang, segera diajukan permohonan kepada fiskus untuk mendapatkan izin tidak membayar pajak lebih lanjut. Apabila pajak terlanjur dibayar lebih besar daripada pajak terutang, perusahaan dapat segera mengupayakan untuk mengajukan restitusi.

2.8 Saat Pelaksanaan Manajemen Pajak

Seperti yang telah dijelaskan, perencanaan pajak merupakan langkah awal dari kegiatan manajemen pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan pada saat:

a. Mendirikan usaha, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara:

1. **Pemilihan bentuk usaha.** Bila dilihat dari segi perpajakan, bentuk badan usaha perseorangan, firma dan CV adalah bentuk yang lebih menguntungkan daripada Perseroan Terbatas (PT) karena pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, pertama atas penghasilan yang diperoleh, kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen.
2. **Pemilihan metode pembukuan,** apakah akan menggunakan accrual basis atau cash basis. Dari segi pajak, maka bentuk accrual basis lebih menguntungkan.
3. **Pemilihan lokasi usaha.** Misalnya, dengan mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aset yang bisa dihapus.

b. Menjalankan usaha. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara:

1. **Pemilihan transaksi-transaksi** yang akan dilakukan dalam kegiatan

operasionalnya.

2. Pemilihan metode akuntansi dan perpajakan. Contohnya pada penggunaan metode penyusutan aset tetap, perusahaan diperbolehkan memilih untuk menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun.
3. Tanggung jawab terhadap stakeholder.

2.9 Tahap-Tahap Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan Barry Spitz dalam Suandy (2006:14), agar sebuah perencanaan pajak dapat berhasil dengan baik maka langkah-langkah berikut ini seharusnya dilaksanakan secara berurutan yaitu:

1. Menganalisis informasi yang ada

Maksudnya adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Untuk itu perlu dipertimbangkan elemen-elemen pajak yang baik masing-masing maupun secara total pajak yang dapat dirumuskan sebagai tax planning yang paling efisien dan juga harus diperhatikan kemungkinan besarnya penghasilan dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

- Fakta yang relevan
- Faktor Pajak
- Faktor nonpajak lainnya

2. Membuat suatu model atau lebih rencana besarnya pajak. Hal ini

mencakup strategi-strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak, seperti pemilihan bentuk usaha, pemilihan bentuk transaksi dan lain sebagainya.

3. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan pajak yang telah dilakukan. Terdapat tiga variabel dalam proses pengevaluasian perencanaan pajak perusahaan yakni: bagaimana jika rencana pajak itu tidak dilaksanakan, bagaimana jika dilaksanakan dan berhasil dengan baik, atau bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi tidak berhasil dengan baik. Dari hasil kajian terhadap ketiga variabel diatas maka baru diputuskan apakah suatu perencanaan pajak layak atau tidak dilaksanakan.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Tindakan perubahan dilakukan sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh. Juga harus diperhatikan di dalam membuat suatu perencanaan pajak sebaiknya dilengkapi keuntungan potensial yang akan diperoleh jika rencana berhasil dan kerugian potensial jika rencana gagal
5. Memutakhirkan rencana pajak. Pemutakhiran ini merupakan suatu konsekuensi yang perlu dilakukan sebab adanya perubahan aktifitas dan peraturan perundang-undangan.

2.10 Strategi Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan

Secara umum strategi perencanaan pajak dapat dibagi menjadi enam item:

1. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Maksudnya adalah melalui pengurangan penghasilan kena pajak dengan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan sebaiknya dilakukan apabila dengan pengurangan tersebut wajib pajak akan terkena tarif PPh yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance*

tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari dari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Strategi ini dilakukan apabila wajib pajak melakukan pengurangan penghasilan kena pajak (laba kotor menurun) menyebabkan tarif pajak tetap tidak dapat diturunkan, maka sebaiknya wajib pajak mengoptimalkan transaksi yang tidak di kenai pajak. Contoh apabila PPh badan tidak dikenakan secara final, sebaiknya memaksimalkan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura, sebab apabila PPh badan tidak final, natura tidak dimasukkan ke dalam objek pajak PPh pasal 21.

3. Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Contoh menunda pembayaran PPN dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diizinkan khususnya atas penjualan kredit, penjual dapat menerbitkan faktur pajak standar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak.

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak harus mengetahui dan jeli mendapatkan informasi pembayaran yang dapat dikreditkan. Kredit pajak merupakan pajak dibayar dimuka

yang telah dipotong pihak lain dan dapat menjadi pengurangan atas PPh tahunan terutang. Contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina oleh perusahaan yang bukan bergerak di bidang penyaluran migas. Seringkali karena ketidaktahuan wajib pajak akan pembayaran yang dapat dikreditkan pajaknya ini, menyebabkan PPh yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih besar dari yang seharusnya.

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindarkan pajak lebih bayar

Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan ini dapat dilakukan paling cepat tiga bulan setelah berjalannya tahun berjalan dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungannya besar Pajak Penghasilan Pasal 25.

6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan dapat mendatangkan sanksi yang justru memperbesar beban pajak yang wajib dibayar.

Perencanaan pajak yang melibatkan transaksi khusus:

1. Revaluasi Aset tetap

Jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap baik revaluasi total maupun revaluasi parsial, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

perusahaan yaitu kondisi perusahaan yang bersangkutan, seperti:

- apakah kondisi perusahaan dalam keadaan laba atau rugi?
- Jika laba, berapa labanya? apakah sudah mencapai tarif yang tertinggi?
- Jika rugi, kapan rugi akan terjadi, apakah tahun berjalan atau pada tahun-tahun sebelumnya?
- Bagaimana dampak revaluasi terhadap beban pajak tahun mendatang?

2. Hutang dan Piutang pada pemegang saham

Bunga yang berasal dari hutang atau piutang kepada pemegang saham harus dihitung dengan tingkat bunga yang wajar. Hutang kepada pemegang saham dapat dibebani apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- pinjaman tersebut berasal dari dana pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.
- Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya.
- pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.
- perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan dana untuk kelangsungan usahanya.

3. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa menurut fiskus:

- wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak

langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih.

- Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Terhadap transaksi hubungan istimewa yang nilainya tidak wajar dan dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak, fiskus dapat melakukan koreksi fiskal untuk memperoleh nilai penghasilan wajar.

4. Bunga pinjaman

Bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk biaya operasional perusahaan.

5. Pencadangan/penghapusan piutang tidak tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih atau pencadangan hanya boleh untuk jenis perusahaan tertentu, yaitu:

- bank
- sewa guna usaha dengan hak opsi
- asuransi kerugian
- asuransi jiwa
- pertambangan

Jenis usaha lainnya yang mengalami kerugian akibat piutang macet dapat

membebaskan piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat tertagih dengan syarat:

- telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
- telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau ada perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur bersangkutan
- telah diumumkan dalam penerbitan umum dan khusus
- wajib pajak harus menyerahkan piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat di tagih kepada Direktorat Jendral Pajak

6. Transaksi Leasing

Transaksi leasing baik secara financial maupun capital leasing harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- jumlah pembayaran lease selama periode lease ditambah dengan nilai residu barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan barang lessor.
- Masa atau periode leasing sekurang-kurangnya:
 - i. dua tahun untuk barang modal golongan I
 - ii. tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III
 - iii. tujuh tahun untuk golongan bangunan

Perlakuan pajak atas transaksi leasing:

- untuk lessor (perusahaan leasing):
 - i. penghasilan leasing yang dikenakan pajak adalah seluruh pembayaran lease yang diterima lessor dikurangi angsuran pokok.

- ii. Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal yang dileasekan
 - untuk lessee (penyewaguna usaha):
 - i. lessee tidak boleh menyusutkan barang modal yang dileasennya sampai saat lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal
 - ii. penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakannya hak opsi. Dasar penyusutan yang dipakai adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.
 - iii. Pembayaran lease yang terutang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- 7. Bunga pinjaman selama masa konstruksi

Bunga pinjaman selama masa konstruksi berupa gedung yang dibangun untuk dipakai sendiri atau untuk disewakan atau untuk dijual kembali, harus dikapitalisasikan ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan

2.11 Perencanaan dan Penggelapan PPh Badan

2.11.1 Pengertian PPh Badan dan Penggelapan PPh Badan

Pajak penghasilan (PPh) badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan (badan usaha) yang biasanya disebut dengan penghasilan kena pajak atau laba kena pajak.

Penghasilan kena pajak perusahaan terdiri dari unsur penghasilan dan biaya fiskal, dimana penentuan penghasilan dan biaya berbeda pada akuntansi keuangan dengan perpajakan. Namun penghitungan penghasilan kena pajak tidak bisa dilepaskan dari kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan. Untuk

Wajib Pajak badan diwajibkan untuk membuat pembukuan yang diatur dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang KUP sehingga memudahkan dalam melakukan perhitungan penghasilan kena pajak secara benar dan akurat.

Penggelapan pajak penghasilan badan/perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan, peraturan dan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip manajemen perpajakan.

2.11.2 Tindakan Yang Dianggap Sebagai Penggelapan Pajak

Adapun tindakan yang dianggap sebagai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Merendahkan atau memperkecil penghasilan yang diperoleh, dengan cara:
 - Melaporkan sebagian penghasilan yang diperoleh atau tidak melaporkan seluruh penghasilan
 - merendahkan harga jual maupun kuantitas barang yang dijual
2. Meningkatkan atau memperbesar biaya usaha dengan cara:
 - membuat utang fiktif guna memperbesar biaya bunga
 - membuat biaya fiktif tidak didukung oleh bukti eksternal
3. Meningkatkan atau memperbesar harga pokok barang, dengan cara:
 - meningkatkan harga pembelian
 - membuat pembelian fiktif
 - membebankan pajak masukan yang telah dikreditkan kedalam harga pokok penjualan

4. Menggunakan penghasilan semata-mata dengan memperkecil biaya sehingga laba bruto tampak tinggi.
5. Pembayaran dividen kepada pemegang saham secara terselubung dengan cara menciptakan seolah-olah pembyaran hutang sebagai upaya untuk menghindarkan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26
6. Merendahkan besarnya penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sementara Pajak Penghasilan perusahaan ditinggikan
7. Meningkatkan harga impor barang dan jasa dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri.
8. Merendahkan harga ekspor barang kepada perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri.

2.11.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak untuk Melakukan Penghematan Pajak Dengan Cara Ilegal

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adapun perbedaaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan

peraturan pajak maupun sumber daya manusia.

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan cara penggelapan pajak (tax evasion) yaitu:

1. *Tax required to pay*

Merupakan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan atau pelanggaran.

2. *Cost of bribe*

Merupakan biaya yang digunakan untuk membayar (menyogok) fiskus, semakin kecil biaya yang digunakan maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

3. *Probability of detection*

Semakin kecil kemungkinan suatu wajib pajak terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak atau pelanggaran.

4. *Size of penalty*

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak atau pelanggaran.

2.12 Perusahaan Perhotelan

2.12.1 Pengertian Hotel dan Jenis-Jenis Hotel

Menurut hukum hotel adalah penginapan yang diwajibkan memenuhi aturan yang berlaku dalam menawarkan penginapan, makanan dan perlindungan

atas barang bawaan tamunya. Secara fisik hotel adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan yang digunakan oleh tamu untuk beberapa saat sebagai tempat peristirahatan serta menyediakan jasa serta fasilitas yang dibutuhkan oleh tamunya.

Hotel dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Hotel Transit

Merupakan turunan dari penginapan tua yang dioperasikan untuk memberikan akomodasi bagi para pelancong atau traveller. Ciri yang membedakannya adalah bahwa hotel jenis ini menjual kamar-kamarnya termasuk makanan, tanpa didahului dengan persetujuan tamu. Akibatnya tarif hotel ditentukan atas dasar uang belanja harian.

2. Hotel Residen

Adalah rumah apartemen dengan jasa hotel dan karena alasan inilah maka hotel ini sering disebut hotel apartemen.

3. Hotel Semiresiden

Hotel ini menawarkan kamar hunian dengan tarif mingguan atau bulanan dan juga dengan tarif harian dengan potongan harga bila ingin tinggal lebih lama.

4. Hotel peristirahatan

Hotel ini hampir sama dengan hotel semiresiden yaitu sama-sama menetapkan tarif harian, mingguan, bulanan atau musiman.

2.12.2 Segmentasi Industri Perhotelan

Atas dasar kondisi ekonomi, jasa dan fasilitas yang disediakan oleh masing-

masing hotel dapat dibuat lima segmentasi hotel yaitu:

- **Hotel Ekonomi**

Adalah hotel yang menyediakan kebutuhan dasar pengunjung, kamar dan ruangan yang bersih dan nyaman dan dekorasi yang secara umum dapat diterima oleh tamu.

- **Hotel Melati**

adalah hotel dengan nuansa modern dan mendasarkan diri pada unsur komersial

- **Hotel Bintang ***

Adalah hotel dengan nuansa modern, komersial dan berusaha bersaing dengan hotel eksekutif.

- **Hotel Bintang *****

Adalah hotel dengan nuansa kemewahan atau mendekati kemewahan dengan dekorasi dan kenyamanan yang menjanjikan.

- **Hotel Mewah**

Hotel ini telah menunjukkan unsur standar kemewahan tertentu, baik dari segi kemewahan maupun kenyamanan.

2.12.3 Perkembangan Perhotelan di Kota Padang

Perkembangan perhotelan di Indonesia khususnya di Sumatra Barat lebih khususnya Kota Padang sangat tergantung pada kelancaran program pariwisata dan bisnis dari pemerintah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan daerah tersebut. Jika ada kekacauan di daerah atau negara tersebut maka tingkat pariwisata terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kedatangan wisatawan

mancanegara ke Sumatra Barat Tahun 2004 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 76.951 orang atau meningkat secara cukup signifikan (29,97 %) dari sebelumnya di tahun 2003 yang hanya 57.283 orang. Akan tetapi, tahun 2005 wisatawan mancanegara yang berkunjung menunjukkan gejala penurunan menjadi 72.462 orang. Kecenderungan yang kurang menggembirakan tersebut tampaknya terus akan berlanjut pada tahun 2007 ini. Sebagaimana diberitakan *Kompas*, 2 Mei 2007, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat lewat Bandara Internasional Minangkabau (BIM) selama bulan Maret 2007, turun 6,54 persen dibandingkan dengan bulan Februari 2007. Penurunan tersebut menjadi lebih tajam jika dibandingkan dengan Februari 2006, terjadi penurunan sebesar 19,09 persen.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif, dilakukan untuk mengetahui dan mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan studi deskriptif yaitu memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena-fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau lainnya (Uma Sekaran:2000)

Penelitian deskriptif menurut Nugroho (2005:14) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu permasalahan agar dapat ditemukan jawabannya, jawaban masalah tersebut disajikan dengan menggambarkan subjek/objek berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan di Kota Padang. Berdasarkan sampel frame yang diambil dari Dinas Pariwisata Kota Padang terdapat 48 hotel di Kota Padang, dan yang masih beroperasi sebanyak 34 hotel. Oleh karena jumlah populasi terbatas, maka semua populasi akan diteliti.

Pemilihan wilayah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut dapat disurvei secara langsung. Yang menjadi subjek dalam

penelitian ini adalah chief accounting atau manajer keuangan hotel atau orang yang mengurus pajak hotel yang bersangkutan. Rincian jumlah hotel yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Rincian Populasi Hotel yang Menjadi Sampel per Klasifikasinya

No	Klasifikasi hotel	Populasi
1	Bintang Empat	2
2	Bintang Tiga	3
3	Bintang Dua	4
4	Bintang Satu	3
5	Hotel Non Bintang	36
	Total	48

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Padang

3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak badan terhadap perencanaan dan pengelapan pajak. Mengukur pemahan seseorang terhadap sesuatu berarti mengukur sejauh mana ia mengetahui, mengerti dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya tingkat pendidikan, pola penyebaran informasi, keberadaan media informasi yang memadai, pengalaman dan lain-lain. Pemahaman ini dijabarkan atas tiga kelompok utama yaitu:

1. Pemahaman Terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan

Variabel pertama digambarkan dengan pertanyaan tentang pengetahuan umum perpajakan seperti mengenai perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Tarif PPh Badan, biaya

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, dan mengenai sanksi dalam perpajakan.

2. Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pajak

Variabel kedua ini akan digambarkan dengan pertanyaan tentang pengertian perencanaan pajak dan tujuannya. Kedudukan perencanaan pajak dalam manajemen pajak, syarat-syarat yang diperlukan dan harus dipenuhi dalam melaksanakan aktifitas perencanaan pajak.

3. Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Penggelapan Pajak

Variabel ketiga ini digambarkan dengan pertanyaan tentang upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak memperkecil penghasilannya.

4. Pemahaman terhadap Strategi-Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh wajib pajak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konsep dasar perencanaan pajak. Dari variabel ini akan diketahui apakah responden telah mengetahui dan memahami tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapat langsung dari pihak pertama. Media yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah daftar pertanyaan (kuisoner). Daftar pertanyaan penelitian ini merupakan replikasi dari daftar pertanyaan Yulia Sari (2007) dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru.

3.5 Teknik Analisis Data

Data penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu analisis yang menggunakan tabel frekuensi, persentase dan model. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data ini adalah sebagai berikut:

- (a) Melakukan tabulasi jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuisioner untuk setiap kelompok variabel.
- (b) Menghitung nilai statistik, yaitu tabel rata-rata (mean), dan median untuk masing-masing kelompok variabel. Nilai-nilai statistik ini digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap masing-masing variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata ini merupakan hasil perhitungan dengan menjumlahkan skor yang diperoleh oleh seluruh responden kemudian membaginya dengan jumlah responden.

BAB IV

ANALISA HASIL

4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini merupakan studi deskriptif mengenai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perencanaan dan penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data diperoleh dengan mengirimkan kuesioner kepada responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang bergerak di bidang perhotelan. Kuesioner yang dikirimkan sebanyak 34 kuesioner dan yang kembali adalah 25 kuesioner. Deskripsi dari pengembalian kuesioner terlihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tingkat Pengembaliann Kuesioner

Keterangan	Frekuensi
Total kuesioner yang dikirim	34
Total kuesioner yang kembali	25
Total kuesioner yang tidak kembali	8
Total kuesioner yang dapat diolah	23
Tingkat pengembalian kuesioner	75.75
Tingkat kuesioner yang dapat diolah	69.69

(Sumber : Lampiran Statistik Deskriptif)

Dari seluruh sampel yang berhasil dikumpulkan, respondennya dapat dideskripsikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden

Deskripsi	Responden	
	Frekuensi	%
Jenis Kelamin :		
• Laki-laki	14	60.86
• Perempuan	9	39.14
Disiplin ilmu :		
• Akuntansi	9	39.14
• Manajemen	11	47.82
• Di luar akuntansi dan manajemen	3	13.04
Kursus pajak :		
• tidak pernah	7	30.43
• pernah	16	69.57
Menggunakan konsultan pajak :		
• tidak pernah	8	34.78
• jarang	11	47.82
• sering	2	8.69
• selalu	2	8.69

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian terdiri dari 60.86% laki-laki dan 39.24% perempuan. Disiplin ilmu yang dimiliki oleh

responden persentase terbesar adalah manajemen yaitu sebesar 47.82%, kemudian 39.14% dari akuntansi dan selebihnya di luar akuntansi dan manajemen. Selanjutnya 69.57% dari responden pernah mengikuti pendidikan perpajakan dan selebihnya tidak pernah mengikuti pendidikan perpajakan, Terakhir dari seluruh responden, 34.78% tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak dalam pengisian SPTnya, 47.82% jarang meminta bantuan konsultan, 8.69% sering dan selalu.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pemahaman Terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan

Untuk menilai pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum perpajakan digunakan 7 butir pertanyaan yang valid dan reliabel. Skala yang digunakan adalah skala Likert dimana tingkat pemahaman diberi bobot 3 untuk *Setuju* (S), 2 untuk *ragu-ragu* (R), 1 untuk *Tidak Setuju* (TS) dan 0 untuk *Tidak Tahu* (TT). Dari urutan penilaian ini diperoleh skor total dan jumlah skor hasil responden yang akan dibandingkan untuk menentukan tingkat pemahaman yang dikelompokkan atas kategori sebagai berikut, dimana responden dikatakan:

- *Tidak Paham*, apabila mendapatkan skor 0% - 30% dari skor ideal
- *Kurang Paham*, apabila mendapatkan skor 31% - 60% dari skor ideal
- *Paham*, apabila mendapatkan skor 61% - 100% dari skor ideal

Hasil jawaban responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Tingkat Pemahaman Pengetahuan Umum Perpajakan

No.	Skor Tingkat Pemahaman				Skor Total	Skor Ideal	% Tingkat Paham
	3	2	1	0			
1	18	5	0	0	64	69	92.75
2	15	4	0	4	53	69	76.68
3	15	8	0	0	61	69	88.4
4	9	7	3	4	44	69	63.76
5	10	3	3	7	39	69	56.52
6	8	5	7	3	41	69	59.42
7	8	7	4	4	42	69	60.86
Jumlah	83	39	17	22	344	483	498.39
Rata	11.86	5.57	2.43	3.14	49.14	69	71.2

(Sumber : Lampiran Statistik Deskriptif)

Dari tabel di atas diperoleh nilai persentase tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum perpajakan adalah sebesar 71.20% atau nilai rata-ratanya tingkat pemahaman dari wajib pajak adalah 14.95. Jika dibandingkan dengan kategori yang ditetapkan maka tingkat pemahaman wajib pajak berada pada kategori paham atas pengetahuan umum perpajakan.

4.2.2 Pemahaman Terhadap Perencanaan Pajak

Untuk menilai pemahaman wajib pajak terhadap perencanaan pajak digunakan 5 butir pertanyaan yang valid dan reliabel. Skala yang digunakan adalah skala Likert dimana tingkat pemahaman diberi bobot 3 untuk *Setuju* (S), 2 untuk *ragu-ragu* (R), 1 untuk *Tidak Setuju* (TS) dan 0 untuk *Tidak Tahu* (TT). Dari urutan penilaian ini diperoleh jumlah skor total dan jumlah skor hasil responden yang akan dibandingkan untuk menentukan tingkat pemahaman yang dikelompokkan atas kategori sebagai berikut, dimana jika responden dikatakan:

- *Tidak Paham*, apabila mendapatkan skor 0% - 30% dari skor ideal
- *Kurang Paham*, apabila mendapatkan skor 31% - 60% dari skor ideal
- *Paham*, apabila mendapatkan skor 61% - 100% dari skor ideal

Hasil jawaban masing-masing responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Tingkat Pemahaman Perencanaan Pajak

No.	Skor Tingkat Pemahaman				Skor Total	Skor Ideal	% Tingkat Paham
	3	2	1	0			
1	16	5	1	1	59	69	85.5
2	17	3	2	1	62	69	89.85
3	20	3	0	0	66	69	95.65
4	4	1	5	13	19	69	27.53
5	12	6	3	2	51	69	73.91

Jumlah	69	18	11	17	257	345	372.44
Rata	13.8	3.6	2.2	3.4	51.4	69	74.49

(Sumber : Lampiran Statistik Deskriptif)

Dari tabel di atas diperoleh nilai persentase tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perencanaan pajak adalah sebesar 74.49% atau nilai rata-ratanya tingkat pemahaman dari wajib pajak adalah 11.17. Jika dibandingkan dengan kategori yang ditetapkan maka tingkat pemahaman wajib pajak berada pada kategori paham atas perencanaan pajak.

4.2.3 Pemahaman Terhadap Penggelapan Pajak

Untuk menilai pemahaman wajib pajak terhadap penggelapan pajak digunakan 4 butir pertanyaan yang valid dan reliabel. Skala yang digunakan adalah skala Likert dimana tingkat pemahaman diberi bobot 3 untuk *Setuju* (S), 2 untuk *ragu-ragu* (R), 1 untuk *Tidak Setuju* (TS) dan 0 untuk *Tidak Tahu* (TT). Dari urutan penilaian ini diperoleh skor total dan jumlah skor hasil responden yang akan dibandingkan untuk menentukan tingkat pemahaman yang dikelompokkan atas kategori sebagai berikut, dimana jika responden dikatakan:

- *Tidak Paham*, apabila mendapatkan skor 0% - 30% dari skor ideal
- *Kurang Paham*, apabila mendapatkan skor 31% - 60% dari skor ideal
- *Paham*, apabila mendapatkan skor 61% - 100% dari skor ideal

Hasil jawaban masing-masing responden dapat dilihat dari tabel berikut ini

:

Tabel 4.5
Tingkat Pemahaman Penggelapan Pajak

No.	Skor Tingkat Pemahaman				Skor Total	Skor Ideal	% Tingkat Paham
	3	2	1	0			
1	19	5	2	1	61	69	88.4
2	14	3	6	0	54	69	78.26
3	12	3	7	1	51	69	73.91
4	16	5	2	0	60	69	84.05
Jumlah	61	16	17	2	226	276	324.62
Rata	15.25	4	4.25	0.5	56.5	69	81.16

(Sumber : Lampiran Statistik Deskriptif)

Dari tabel di atas diperoleh nilai persentase tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penggelapan pajak adalah sebesar 81.16% atau nilai rata-ratanya tingkat pemahaman dari wajib pajak adalah 9.82. Jika dibandingkan dengan kategori yang ditetapkan maka tingkat pemahaman wajib pajak berada pada kategori paham atas penggelapan pajak.

4.2.4 Pemahaman terhadap Strategi Perencanaan Pajak

Untuk menilai pemahaman wajib pajak terhadap strategi perencanaan pajak digunakan 7 butir pertanyaan yang valid dan reliabel. Skala yang digunakan adalah skala Likert dimana tingkat pemahaman diberi bobot 3 untuk *Setuju* (S), 2 untuk *ragu-ragu* (R), 1 untuk *Tidak Setuju* (TS) dan 0 untuk *Tidak Tahu* (TT).

Dari urutan penilaian ini diperoleh skor total dan jumlah skor hasil responden yang akan dibandingkan untuk menentukan tingkat pemahaman yang dikelompokkan atas kategori sebagai berikut, dimana jika responden dikatakan:

- *Tidak Paham*, apabila mendapatkan skor 0% - 30% dari skor ideal
- *Kurang Paham*, apabila mendapatkan skor 31% - 60% dari skor ideal
- *Paham*, apabila mendapatkan skor 61% - 100% dari skor ideal

Hasil jawaban masing-masing responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Tingkat Pemahaman Strategi Perencanaan Pajak

No.	Skor Tingkat Pemahaman				Skor Total	Skor Ideal	% Tingkat Paham
	3	2	1	0			
1	17	4	2	0	61	69	88.4
2	9	4	2	8	37	69	53.62
3	17	2	4	0	59	69	85.5
4	1	8	3	10	22	69	31.88
5	4	8	4	7	32	69	46.37
6	11	4	2	6	43	69	62.31
7	8	4	5	6	37	69	53.62
Jumlah	67	34	22	37	291	483	421.7
Rata	9.57	4.86	3.14	5.29	41.57	69	60.24

(Sumber : Lampiran Statistik Deskriptif)

Dari tabel di atas diperoleh persentase tingkat pemahaman wajib pajak terhadap strategi perencanaan pajak adalah sebesar 60.24% atau nilai rata-ratanya tingkat pemahaman dari wajib pajak adalah 12.65. Jika dibandingkan dengan kategori yang ditetapkan maka tingkat pemahaman wajib pajak berada pada kategori paham atas strategi perencanaan pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk melihat tingkat pemahaman wajib pajak yang bergerak di bidang perhotelan. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak duapuluh tiga (23) perusahaan jasa perhotelan yang ada di Kota Padang sebagai responden. Variabel penelitian ini adalah pemahaman tentang ketentuan umum perpajakan, pemahaman tentang konsep dasar perencanaan pajak, pemahaman tentang penggelapan pajak dan pemahaman tentang strategi perencanaan pajak.

Setelah diolah dan diuji dengan menggunakan instrumen statistik, diperoleh hasil bahwa responden tergolong paham terhadap perencanaan dan penggelapan pajak. Jika dilihat lebih rinci per variabel pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan berada pada 71.20%, pemahaman terhadap perencanaan pajak 74.49%, pemahaman terhadap penggelapan pajak 81.16% dan pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak 60.24%.

Dari angka-angka diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa wajib pajak perusahaan jasa perhotelan yang ada di Kota Padang selama ini hanya mengetahui perencanaan dan penggelapan pajak secara umum saja, terlihat dari masih rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, karena secara teoritis perencanaan dan penggelapan pajak dimulai terlebih dahulu mengetahui dan memahami ketentuan umum perpajakan yang berlaku, dan kemudian mencari celahnya. Hal tersebut juga tampak pada tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap strategi perencanaan pajak itu sendiri yang tergolong

masih rendah. Hal itu berarti bahwa wajib pajak badan hanya mengetahui tujuan dari perencanaan dan penggelapan pajak tanpa tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa keterbatasan yang diperkirakan secara langsung dapat mempengaruhi penelitian.

Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Sampel pada penelitian ini hanya mencakup wajib pajak badan yang bergerak dibidang jasa perhotelan.
2. Penelitian ini hanya menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perencanaan dan penggelapan pajak, tanpa menganalisis tingkat pemahaman fiskus.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian terlihat bahwa tingkat pemahaman dari wajib pajak badan masih cukup rendah. Adapun saran yang bisa peneliti berikan adalah:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada petugas penghitung pajak perusahaan untuk menjalani kursus-kursus ataupun seminar mengenai perpajakan.
2. Pemahaman mengenai perbedaan perencanaan dan penggelapan pajak bisa ditingkatkan dengan pemberian pelatihan oleh petugas pajak setempat.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. (2009). Akuntansi Perpajakan, Edisi-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Cooper, Donald. R dan Schindler, Pamela S. (2006) . Metode Riset Bisnis, Edisi-9. Jakarta: Mcgraw-Hill Irwin.
- Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Sumatra Barat. (2010). Data Statistik Parawisata Provinsi Sumatra Barat Tahun 2009, Padang.
- Ilyas, Wirawan.B dan Burton, Richard. (2008). Hukum Pajak, Edisi-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Bhuono Agung. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sekaran, Uma. (2000). Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. (2007). Perpajakan, Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2008). Perencanaan Pajak, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Hukum Pajak, Edisi-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2009). Akuntansi Pajak, Edisi-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Muhammad. (2008). Manajemen Perpajakan, Edisi-3. Jakarta: Salemba Empat.

KUISIONER

Kuisisioner ini semata mata digunakan untuk penelitian tentang pemahaman wajib pajak badan yang bergerak di bidang jasa perhotelan terhadap perencanaan pajak legal dan illegal.

Identitas Responden

- Nama :
- Jabatan Responden :
- Bagian :
- Jenis Kelamin :
- Tingkat Pendidikan :

I. Pemahaman Mengenai Pengetahuan Umum Perpajakan.

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (x) pada kotak "S" jika Bapak/Ibuk setuju dengan pernyataan yang diberikan, "R" jika ragu, "TS" jika tidak setuju dan "TT" tidak tahu.

Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terhitung sejak satu bulan setelah usaha di jalankan.	S	R	TS	TT
Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau tidak menyampaikan SPT, maka akan dibebankan sanksi berupa hukuman pidana maksimal 6 bulan dan denda maksimal 4 kali jumlah pajak terutang.	S	R	TS	TT
Fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah paak terutang, melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak.	S	R	TS	TT
Sehubungan dengan penerbitan SKPKB oleh dirjen pajak, wajib pajak harus membayar sebesar jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% maksimal 48% perbulan	S	R	TS	TT
Tarif pajak penghasilan badan adalah 25%	S	R	TS	TT
Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan saraana wajib pajak dalam membayar pajak yang selanjutnya berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak.	S	R	TS	TT
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan adalah sama besarnya dengan angsuran pajak untk bulan-bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu	S	R	TS	TT

II Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pajak Secara Legal

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (x) pada kotak "S" jika Bapak/Ibuk setuju dengan pernyataan yang diberikan, "R" jika ragu, "TS" jika tidak setuju dan "TT" tidak tahu.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak	S	R	TS	TT
Perencanaan pajak bertujuan menjaga likuiditas perusahaan dan dilakukan	S	R	TS	TT

dengan cara perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi perpajakan				
Dalam aspek perencanaan pajak sangat diperlukan tertibnya administrasi yang meliputi antara lain; sistem akuntansi yang memadai, pengelolaan arsip yang rapi, penentuan staf yang bertanggung jawab secara penuh dan lain-lain	S	R	TS	TT
Perencanaan pajak juga mencakup strategi pengurangan jumlah pajak yang dibayar dengan cara berkompromi dengan fiskus.	S	R	TS	TT
Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan tax planning tidak terlepas dari aspek perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan	S	R	TS	TT

III. Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Penggelapan Pajak

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (x) pada kotak "S" jika Bapak/Ibuk setuju dengan pernyataan yang diberikan, "R" jika ragu, "TS" jika tidak setuju dan "TT" tidak tahu.

Upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan alat dan melanggar peraturan perpajakan hal ini termasuk kedalam tindakan perencanaan pajak secara legal	S	R	TS	TT
Merendahkan atau memperkecil penghasilan yang diperoleh yaitu dengan cara; melaporkan sebagian penghasilan ini tidak termasuk ke dalam tindakan penggelapan pajak	S	R	TS	TT
Misalkan perusahaan menyewa kantor kepada Tuan Amir sebesar Rp. 90.000.000 untuk 3 tahun, Tuan Amir tidak bersedia diotong pajaknya sebesar 10% final atas sewa bangunan tersebut. Untuk menghindari denda bila diperiksa fiskus, sebaiknya perusahaan membayar pajak 10% tersebut dan menambahnya ke harga transaksi menjadi Rp. 99.000.000	S	R	TS	TT
Tuan A memperoleh penghasilan sebesar Rp. 30.000.000 setahun untuk menghindari pembayaran pajak, maka Tuan A melaporkan sebagian penghasilan yang diperolehnya. Tindakan ini termasuk dalam tindakan perencanaan pajak secara ilegal.	S	R	TS	TT

V. Pemahaman Terhadap Strategi-Strategi Perencanaan Pajak

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (x) pada kotak "S" jika Bapak/Ibuk setuju dengan pernyataan yang diberikan, "R" jika ragu, "TS" jika tidak setuju dan "TT" tidak tahu.

Strategi perencanaan pajak merupakan bagian dari penghindaran pajak secara legal	S	R	TS	TT
Apabila perusahaan bertujuan untuk memperkecil beban pajak, perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura/kenikmatan lain sepanjang tunjangan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan	S	R	TS	TT

3	Untuk tujuan penghematan pajak, bagi perusahaan lebih baik memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang/natura/kenikmatan lain sepanjang tunjangan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan	S	R	TS	TT
4	Perencanaan pajak mencakup strategi pengurangan jumlah pajak yang dibayar dengan cara berkompromi dengan fiskus	S	R	TS	TT
5	Wajib pajak tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat dihitung berdasarkan jumlah yang disepakati oleh wajib pajak dan fiskud	S	R	TS	TT
	Apabila perusahaan dipotong Pph pasal 4 ayat 2 atas bunga non Bank maka perusahaan tidak dapat mengurangi Pph Badan	S	R	TS	TT
	Apabila perusahaan bertujuan menghemat pajak, maka dalam melakukan penambahan modal kerjanya perusahaan lebih baik melakukan pinjaman secara kredit daripada melakukan penjualan saham, karena dari segi pajak pembayaran bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, sehingga pajak yang dibyarkan lebih kecil.	S	R	TS	TT

V. Latar Belakang Pendidikan

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (x) pada tempat yang disediakan

- Disiplin ilmu pendidikan formal Bapak/Ibuk adalah
 - ☐ Manajemen
 - ☐ Akuntansi
 - ☐ Diluar Manajemen dan Akuntansi
- Apakah Bapak/Ibuk pernah mengikuti Pendidikan Perpajakan?
 - ☐ Tidak Pernah
 - ☐ Pernah, Setara Brevet A
 - ☐ Pernah, Setara Brevet B
 - ☐ Pernah, Setara Brevet C
- Selain kursus dan pendidikan perpajakan, juga pernah mengikuti seminar perpajakan yang mutakhir?
 - ☐ Tidak Pernah
 - ☐ Pernah, Tapi tidak Rutin
 - ☐ Selalu mengikuti
- Apakah dalam mengisi SPT meminta bantuan kepada konsultan pajak?
 - ☐ Tidak Pernah
 - ☐ Jarang
 - ☐ Sering
 - ☐ Selalu
- Sudah berapa lama Bapak/Ibuk bekerja pada bidang ini?
 - ☐ Kurang dari 1 tahun
 - ☐ 1 sampai 2 tahun
 - ☐ lebih dari 2 tahun
 - ☐ sudah lebih dri 5 tahun

--TERIMA KASIH--